**PERJANJIAN PENEMPATAN
ANTARA
PERUSAHAAN PENEMPATAN PEKERJA MIGRAN INDONESIA (P3MI)
DENGAN
CALON PEKERJA MIGRAN INDONESIA (CPMI)
NEGARA PENEMPATAN : KUWAIT
Jabatan : MASSAGE THERAPIST**

Pada hari ini **KAMIS** Tanggal **07** Bulan **November** tahun **2024** Telah diadakan Perjanjian Penempatan antara :

I. Nama Penanggung Jawab : YULIAWATY
Jabatan : DIREKTUR UTAMA PT DWI TUNGGAL JAYA ABADI
Nama P3MI : PT DWI TUNGGAL JAYA ABADI
Nomor SIPP3MI : 9120007211347
Alamat : JL.MT HARYONO NO.9 RT/RW 006/016 KEL.SUKASARI
TANGERANG PROV.BANTEN
No.Telp/HP/e-mail : 02155786404

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama PT. DWI TUNGGAL JAYA ABADI Selanjutnya dalam Perjanjian Penempatan ini disebut **PIHAK KESATU**

II. Nama Calon PMI :
Tempat & Tanggal Lahir :
Jenis Kelamin :
Status :
KTP : a. Nomor : -
b. tanggal : -
c. dikeluarkan di : -
Alamat :
Pendidikan Terakhir :
Telp/HP CPMI :
Nama Orang Tua :
Nama Ibu :
Alamat Orang Tua :
Nama Suami :
Alamat Suami :
Telp/HP Suami/Istri :

Selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**

PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA sepakat untuk mengadakan dan melaksanakan Perjanjian Penempatan dengan ketentuan dan syarat-syarat sebagai berikut :

BAB 1
HAK DAN KEWAJIBAN PIHAK PERTAMA
PASAL 1

- (1) **PIHAK PERTAMA** sanggup menempatkan **PIHAK KEDUA** untuk bekerja pada
- a. Negara Tempat Bekerja : HERBAL SPA
 - b. Alamat pengguna : REGGAE BLOCK 2 ST.1 BLDG 119 KUWAIT
 - c. Jabatan Pekerjaan : MASSAGE THERAPIST
 - d. Gaji Pokok : 150KWD
 - e. Lama Kontrak Kerja : 2 (Dua) Tahun (Sesuai Perjanjian Kerja)
 - f. Hari Kerja : 6 Hari Kerja (Sesuai Peraturan)
 - g. Hari Libur : 1 (satu) hari / minggu (Sesuai Peraturan)
 - h. Lembur : Sesuai Peraturan
- (2) **PIHAK PERTAMA** sanggup menempatkan **PIHAK KEDUA** sebagaimana tersebut pada ayat (1) selambat-lambatnya 2 (tiga) bulan setelah Perjanjian Penempatan ditandatangani (MOU).
- (3) **PIHAK PERTAMA** melalui mitra usahanya berkewajiban untuk memastikan bahwa **PIHAK KEDUA** bekerja sesuai dengan Perjanjian Kerja yang telah ditandatangani para pihak.
- (4) **PIHAK PERTAMA** dilarang mempekerjakan **PIHAK KEDUA** pada hotel/lembaga lain selain hotel/lembaga yang tercantum di dalam Perjanjian Kerja.

Pasal 2

PIHAK PERTAMA wajib mengikutsertakan **PIHAK KEDUA** dalam asuransi Pra Penempatan, Masa Penempatan, dan Purna Penempatan.

Pasal 3

- (1) **PIHAK PERTAMA** wajib mengurus dokumen keberangkatan **PIHAK KEDUA** berupa Paspor, Visa Kerja, dan Kepesertaan Asuransi.
- (2) **PIHAK KEDUA** wajib membiayai pengurusan dokumen jati diri berupa Pemeriksaan Psikologi dan Kesehatan.
- (3) Biaya-biaya yang timbul diluar sebagaimana dimaksud pada ayat (2), menjadi beban **PIHAK PERTAMA**.
- (4) **PIHAK PERTAMA** wajib memberikan salinan Perjanjian Penempatan, Paspor, Visa dan Perjanjian Kerja pada keluarga **PIHAK KEDUA**

Pasal 4

PIHAK PERTAMA wajib melakukan pemeriksaan kesehatan bagi **PIHAK KEDUA** sesuai peraturan yang berlaku.

Pasal 5

- (1) **PIHAK KEDUA** wajib memiliki sertifikat pendidikan dan pelatihan
- (2) **PIHAK PERTAMA** wajib mengikutsertakan **PIHAK KEDUA** dalam mendapatkan materi Pembekalan Akhir Pemberangkatan (PAP).

Pasal 6

PIHAK PERTAMA wajib melaporkan kedatangan **PIHAK KEDUA** kepada Perwakilan RI di Negara Penempatan.

Pasal 7

PIHAK PERTAMA wajib membantu menyelesaikan kasus dan masalah **PIHAK KEDUA** baik pada masa pra, masa maupun purna penempatan.

BAB II HAK DAN KEWAJIBAN PIHAK KEDUA

Pasal 8

PIHAK KEDUA berhak untuk :

1. Menolak keberangkatan atau penempatan yang tidak sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud pasal 1
2. Menjalankan ibadah sesuai agama dan keyakinan yang dianutnya.
3. Mendapatkan poli asuransi PMI (Pra, masa dan Purna Penempatan).
4. Mendapatkan Kartu Peserta Asuransi (KPA)
5. MENDAPATKAN Perjanjian Kerja yang telah ditandatangani oleh Para Pihak sebelum ditempatkan di Negara Penempatan.
6. Mendapatkan pendidikan dan pelatihan sesuai dengan permintaan Negara Penempatan.
7. Menyimpan dokumen jati diri (Paspor Asli) selama di Negara Penempatan.
8. Memperoleh ganti rugi dari **PIHAK PERTAMA** jika pengguna melanggar ketentuan sebagaimana diatur dalam Perjanjian Kerja.
9. Memperoleh ganti rugi dari **PIHAK PERTAMA** jika terjadi kegagalan keberangkatan yang bukan di sebabkan oleh **PIHAK KEDUA**.

Pasal 9

PIHAK KEDUA wajib memberikan dokumen jati diri (KTP, Surat Keterangan Status Perkawinan, Surat Ijin Orang Tua/Wali) yang sebenar-benarnya.

BAB III PEMBIAYAAN Pasal 10

(1) **PIHAK KEDUA** membayar biaya penempatan sesuai dengan KEPKA BP2MI 441 tahun 2023, terlampir biaya dengan rincian di bawah ini, dan total Rp. 5.181.000

(Lima Juta Seratus Delapan Puluh Satu Ribu Rupiah) terdiri dari :

a. Pemeriksaan Kesehatan	Rp	1.315.000
b. Pemeriksaan Psikology	Rp	550.000
c. Pra BPJS	Rp	37.500
d. SKCK	Rp	30.000
e. Bpjs Full	Rp	332.500
f. Dokumen Perjalanan (Paspor)	Rp	0
g. Transport Jawa	Rp	500.000
h. Transport luar Jawa	Rp	2.000.000
i. Legalisasi	Kwd	8

BAB IV
GAGAL BERANGKAT
Pasal 11

Dalam hal **PIHAK KEDUA** dinyatakan tidak sehat melalui pemeriksaan kesehatan di **LABORATORIUM** maka **PIHAK PERTAMA** wajib membiayai kepulangan **PIHAK KEDUA** sampai daerah asal.

P.T. Dwi Tunggal Jaya Abadi

Address : JL MT HARYONO NO 9 RT06 RW16 SUKASARI, TANGERANG, KOTA TANGERANG

Telp : (021) 55786404 Fax : (021) 55786404 E-mail : dwitja168@yahoo.com

Pasal 12

Dalam hal **PIHAK KEDUA** mengundurkan diri maka **PIHAK KEDUA** wajib mengembalikan biaya Penempatan yang telah di keluarkan oleh **PIHAK PERTAMA** sesuai bukti pembayaran yang sah.

BAB V

PENYELESAIAN PERBEDAAN PENDAPAT

Pasal 13

- (1) Apabila timbul perselisihan mengenai pelaksanaan Perjanjian Penempatan antara **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA**, maka penyelesaian dilakukan secara musyawarah.
- (2) Dalam hal musyawarah sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) tidak tercapai, maka salah satu atau kedua belah pihak dapat meminta bantuan penyelesaian/perselisihan tersebut kepada Dinas Kab/Kota dan Provinsi serta Kemnaker yang terkoordinasi.

BAB VI

PENUTUP

Pasal 14

Perjanjian Penempatan ditandatangani oleh kedua belah pihak tanpa paksaan dari pihak manapun serta diketahui oleh Dinas Kab/Kota Setempat dan dibuat rangkat 3(tiga) dan bermaterai secukupnya. Lembar pertama untuk **PIHAK KEDUA**, lembar kedua untuk **PIHAK PERTAMA**, Lembar ketiga untuk **Dinas Kab/Kota**.

Perjanjian Penempatan ini berlaku sejak ditandatangani oleh **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** sampai dengan 3 (tiga) bulan atau sampai **PIHAK KEDUA** bekerja ke Luar Negeri.

PIHAK PERTAMA

**PERJANJIAN PENEMPATAN
ANTARA
PERUSAHAAN PENEMPATAN PEKERJA MIGRAN INDONESIA (P3MI)
DENGAN
CALON PEKERJA MIGRAN INDONESIA (CPMI)
NEGARA PENEMPATAN : KUWAIT
Jabatan : RECEPTIONIST**

Pada hari ini **KAMIS** Tanggal **07** Bulan **November** tahun **2024** Telah diadakan Perjanjian Penempatan antara :

III. Nama Penanggung Jawab : YULIAWATY
Jabatan : DIREKTUR UTAMA PT DWI TUNGGAL JAYA ABADI
Nama P3MI : PT DWI TUNGGAL JAYA ABADI
Nomor SIPP3MI : 9120007211347
Alamat : JL.MT HARYONO NO.9 RT/RW 006/016 KEL.SUKASARI
TANGERANG PROV.BANTEN
No.Telp/HP/e-mail : 02155786404

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama PT. DWI TUNGGAL JAYA ABADI Selanjutnya dalam Perjanjian Penempatan ini disebut **PIHAK KESATU**

IV. Nama Calon PMI :
Tempat & Tanggal Lahir :
Jenis Kelamin :
Status :
KTP : a. Nomor : -
b. tanggal : -
c. dikeluarkan di : -
Alamat :
Pendidikan Terakhir :
Telp/HP CPMI :
Nama Orang Tua :
Nama Ibu :
Alamat Orang Tua :
Nama Suami :
Alamat Suami :

Telp/HP Suami/Istri :

Selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**

PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA sepakat untuk mengadakan dan melaksanakan Perjanjian Penempatan dengan ketentuan dan syarat-syarat sebagai berikut :

BAB 1
HAK DAN KEWAJIBAN PIHAK PERTAMA
PASAL 1

- (5) **PIHAK PERTAMA** sanggup menempatkan **PIHAK KEDUA** untuk bekerja pada
- a. Negara Tempat Bekerja : HERBAL SPA
 - b. Alamat pengguna : REGGAE BLOCK 2 ST.1 BLDG 119 KUWAIT
 - c. Jabatan Pekerjaan : RECEPTIONIST
 - d. Gaji Pokok : 150KWD
 - e. Lama Kontrak Kerja : 2 (Dua) Tahun (Sesuai Perjanjian Kerja)
 - f. Hari Kerja : 6 Hari Kerja (Sesuai Peraturan)
 - g. Hari Libur : 1 (satu) hari / minggu (Sesuai Peraturan)
 - h. Lembur : Sesuai Peraturan
- (6) **PIHAK PERTAMA** sanggup menempatkan **PIHAK KEDUA** sebagaimana tersebut pada ayat (1) selambat-lambatnya 2 (tiga) bulan setelah Perjanjian Penempatan ditandatangani (MOU).
- (7) **PIHAK PERTAMA** melalui mitra usahanya berkewajiban untuk memastikan bahwa **PIHAK KEDUA** bekerja sesuai dengan Perjanjian Kerja yang telah ditandatangani para pihak.
- (8) **PIHAK PERTAMA** dilarang mempekerjakan **PIHAK KEDUA** pada hotel/lembaga lain selain hotel/lembaga yang tercantum di dalam Perjanjian Kerja.

Pasal 2

PIHAK PERTAMA wajib mengikutsertakan **PIHAK KEDUA** dalam asuransi Pra Penempatan, Masa Penempatan, dan Purna Penempatan.

Pasal 3

- (5) **PIHAK PERTAMA** wajib mengurus dokumen keberangkatan **PIHAK KEDUA** berupa Paspor, Visa Kerja, dan Kepesertaan Asuransi.
- (6) **PIHAK KEDUA** wajib membiayai pengurusan dokumen jati diri berupa Pemeriksaan Psikologi dan Kesehatan.
- (7) Biaya-biaya yang timbul diluar sebagaimana dimaksud pada ayat (2), menjadi beban **PIHAK PERTAMA**.
- (8) **PIHAK PERTAMA** wajib memberikan salinan Perjanjian Penempatan, Paspor, Visa dan Perjanjian Kerja pada keluarga **PIHAK KEDUA**

Pasal 4

PIHAK PERTAMA wajib melakukan pemeriksaan kesehatan bagi **PIHAK KEDUA** sesuai peraturan yang berlaku.

Pasal 5

- (3) **PIHAK KEDUA** wajib memiliki sertifikat pendidikan dan pelatihan
- (4) **PIHAK PERTAMA** wajib mengikutsertakan **PIHAK KEDUA** dalam mendapatkan materi Pembekalan Akhir Pemberangkatan (PAP).

Pasal 6

PIHAK PERTAMA wajib melaporkan kedatangan **PIHAK KEDUA** kepada Perwakilan RI di Negara Penempatan.

Pasal 7

PIHAK PERTAMA wajib membantu menyelesaikan kasus dan masalah **PIHAK KEDUA** baik pada masa pra, masa maupun purna penempatan.

BAB II HAK DAN KEWAJIBAN PIHAK KEDUA

Pasal 8

PIHAK KEDUA berhak untuk :

1. Menolak keberangkatan atau penempatan yang tidak sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud pasal 1
2. Menjalankan ibadah sesuai agama dan keyakinan yang dianutnya.
3. Mendapatkan poli asuransi PMI (Pra, masa dan Purna Penempatan).
4. Mendapatkan Kartu Peserta Asuransi (KPA)
5. MENDAPATKAN Perjanjian Kerja yang telah ditandatangani oleh Para Pihak sebelum ditempatkan di Negara Penempatan.
6. Mendapatkan pendidikan dan pelatihan sesuai dengan permintaan Negara Penempatan.
7. Menyimpan dokumen jati diri (Paspor Asli) selama di Negara Penempatan.
8. Memperoleh ganti rugi dari **PIHAK PERTAMA** jika pengguna melanggar ketentuan sebagaimana diatur dalam Perjanjian Kerja.
9. Memperoleh ganti rugi dari **PIHAK PERTAMA** jika terjadi kegagalan keberangkatan yang bukan di sebabkan oleh **PIHAK KEDUA**.

Pasal 9

PIHAK KEDUA wajib memberikan dokumen jati diri (KTP, Surat Keterangan Status Perkawinan, Surat Ijin Orang Tua/Wali) yang sebenar-benarnya.

BAB III PEMBIAYAAN Pasal 10

(2) **PIHAK KEDUA** membayar biaya penempatan sesuai dengan KEPKA BP2MI 441 tahun 2023, terlampir biaya dengan rincian di bawah ini, dan total Rp. 5.181.000

(Lima Juta Seratus Delapan Puluh Satu Ribu Rupiah) terdiri dari :

a. Pemeriksaan Kesehatan	Rp	1.315.000
b. Pemeriksaan Psikology	Rp	550.000
c. Pra BPJS	Rp	37.500
d. SKCK	Rp	30.000
e. Bpjs Full	Rp	332.500
f. Dokumen Perjalanan (Paspor)	Rp	0
g. Transport Jawa	Rp	500.000
h. Transport luar Jawa	Rp	2.000.000
i. Legalisasi	Kwd	8

BAB IV
GAGAL BERANGKAT
Pasal 11

Dalam hal **PIHAK KEDUA** dinyatakan tidak sehat melalui pemeriksaan kesehatan di **LABORATORIUM** maka **PIHAK PERTAMA** wajib membiayai kepulangan **PIHAK KEDUA** sampai daerah asal.

P.T. Dwi Tunggal Jaya Abadi

Address : JL MT HARYONO NO 9 RT06 RW16 SUKASARI, TANGERANG, KOTA TANGERANG

Telp : (021) 55786404 Fax : (021) 55786404 E-mail : dwitja168@yahoo.com

Pasal 12

Dalam hal **PIHAK KEDUA** mengundurkan diri maka **PIHAK KEDUA** wajib mengembalikan biaya Penempatan yang telah di keluarkan oleh **PIHAK PERTAMA** sesuai bukti pembayaran yang sah.

BAB V

PENYELESAIAN PERBEDAAN PENDAPAT

Pasal 13

- (3) Apabila timbul perselisihan mengenai pelaksanaan Perjanjian Penempatan antara **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA**, maka penyelesaian dilakukan secara musyawarah.
- (4) Dalam hal musyawarah sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) tidak tercapai, maka salah satu atau kedua belah pihak dapat meminta bantuan penyelesaian/perselisihan tersebut kepada Dinas Kab/Kota dan Provinsi serta Kemnaker yang terkoordinasi.

BAB VI

PENUTUP

Pasal 14

Perjanjian Penempatan ditandatangani oleh kedua belah pihak tanpa paksaan dari pihak manapun serta diketahui oleh Dinas Kab/Kota Setempat dan dibuat rangkat 3(tiga) dan bermaterai secukupnya. Lembar pertama untuk **PIHAK KEDUA**, lembar kedua untuk **PIHAK PERTAMA**, Lembar ketiga untuk **Dinas Kab/Kota**.

Perjanjian Penempatan ini berlaku sejak ditandatangani oleh **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** sampai dengan 3 (tiga) bulan atau sampai **PIHAK KEDUA** bekerja ke Luar Negeri.

PIHAK PERTAMA